

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah untuk memberdayakan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian Indonesia selain bertujuan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi kegiatan usaha yang tangguh dan mandiri. Di samping itu juga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kebijakan tersebut cukup beralasan mengingat sejak pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), perekonomian Indonesia terbangun dengan struktur yang sangat timpang antara Jawa dan luar Jawa, Sementara penekanan yang sangat kuat pada aspek keseimbangan, pemerataan dan keadilan dilandasi fakta historis di masa lalu bahwa, sumberdaya alam yang melimpah di luar Jawa dieksploitasi habis-habisan, tetapi dampak ekonomis regional yang dihasilkan bagi masyarakat di daerah tidak sepadan dengan yang terjadi di Pulau Jawa.

Pandangan laten yang demikian telah lama berkembang yang menurut Majidi (2004) dari sudut pandang wawasan nusantara adalah berbahaya karena cenderung tidak mempercayai proses distribusi ekonomi nasional yang adil dan proporsional antardaerah, bahkan yang lebih radikal lagi diterjemahkan oleh sekelompok masyarakat menjadi proses pembangkangan terhadap eksistensi pemerintahan nasional dalam bentuk pergelaran gerakan politik. Kondisi yang demikian terjadi selain

disebabkan proporsi pelaksanaan pembangunan nasional selama PJPT I terlalu bertumpu di Pulau Jawa atau di Kawasan Barat Indonesia dibanding Kawasan Timur. Di samping itu, strategi pembangunan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah selama Orde Baru terlalu berorientasi pada industri substitusi impor. Implikasinya, hasil pembangunan ekonomi nasional tidak menciptakan struktur yang seimbang khususnya antara Jawa dan luar Jawa atau antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. serta tidak memberikan solusi terhadap upaya pemecahan masalah kesempatan kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Sejak PJPT I, pembangunan ekonomi nasional di Indonesia memang berhasil menciptakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahun. Badan Pusat Statistik melansir bahwa, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia selama PJPT I berada di atas angka 5,00 % per tahun (Anonim, 1995). Meskipun laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai cukup tinggi, yang diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian serta kemajuan-kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek pembangunan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak dengan serta merta memberikan implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa secara cukup berarti. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1999 yang ditandai dengan kontraksi ekonomi yang dalam (minus 13,7 %), tingkat inflasi yang sangat tinggi (77,6 %), pengangguran meningkat tajam, nilai tukar rupiah bergejolak dan terdepresiasi pada level yang amat rendah, fungsi intermediasi perbankan mandek, terjerat utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar dan keuangan negara terancam bangkrut (Basalim, 2000), turut mempersulit terwujudnya proses akselerasi pemerataan kesejahteraan ekonomi bangsa secara menyeluruh. Perubahan konfigurasi struktur ekonomi pun pada

akhirnya menimbulkan masalah kesenjangan ekonomi yang bersifat sentrifugal. Artinya, transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia yang sejak 1994 itu diharapkan akan diikuti oleh pemerataan kesejahteraan ekonomi, ternyata belum sepenuhnya dapat menghapus kesenjangan ekonomi baik antargolongan pendapatan, antardaerah, antarsektor ekonomi maupun antarpelaku dalam masing-masing sektor ekonomi. Faktor penyebabnya adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan pemerintah yang terlalu bertumpu pada strategi industri substitusi impor.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang mengandalkan strategi industri substitusi impor menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Menurut Basalim (2000) industri substitusi impor selain menggunakan : (1) teknologi modern dan padat modal, sehingga tidak dapat diandalkan untuk mengurangi tekanan pengangguran, (2) bahan baku/penolong dan barang modal dipasok dari luar negeri (impor), sehingga tidak menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan di dalam negeri dan cenderung memboros devisa. Di samping itu, (3) hasil produksinya dipasarkan di dalam negeri. Implikasinya, industri substitusi impor tidak menghasilkan devisa, sehingga untuk membayar faktor-faktor impor harus dipenuhi dengan pinjaman luar negeri. Dengan perkataan lain, semakin berkembang industri substitusi impor, semakin besar beban utang luar negeri dan semakin timpang distribusi pendapatan masyarakat di dalam negeri. .

Untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat, sejak tahun 2008 (PJPT II) pemerintah mulai mengembangkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan pemerintah ini terutama didasarkan pada kenyataan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama PJPT I tidak

memberi dampak seperti yang diharapkan terhadap penyediaan kesempatan kerja, dan pada saat yang sama distribusi pendapatan dalam masyarakat semakin timpang (Tambunan, 2013). Oleh karena itu, harapan pemerintah bahwa dengan pertumbuhan UMKM yang semakin baik, selain akan menciptakan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk dan mengurangi jumlah pengangguran terutama di daerah-daerah perdesaan. Di samping itu juga, dalam proses selanjutnya dapat memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi lokalita, pengembangan UMKM berperan sangat esensial sebagai sektor kegiatan usaha yang lebih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk dengan penghasilan rendah, karena jenis-jenis usaha tersebut menghasilkan produk-produk dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan produk-produk hasil produksi usaha industri berskala besar seperti industri substitusi impor. Dengan perkataan lain, peranan UMKM bagi perekonomian lokal, baik untuk tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi, sangat tergantung di satu pihak pada intensifikasi penggunaan tenaga kerja lokal sebagai pekerja, tabungan penduduk lokal sebagai dana investasi, dan bahan baku lokal sebagai input utama. Sementara di lain pihak, besarnya pelayanan UMKM yang terutama adalah terhadap konsumen dan produsen lokal, sehingga secara konsepsional maupun dalam prakteknya, pengembangan jenis-jenis usaha tersebut lebih mempercepat peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan ekonomi di dalam masyarakat.

Salah satu jenis UMKM yang mempunyai peranan cukup penting baik dalam penyediaan dan penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan adalah usaha

kudapan kenari. Perkembangan usaha ini tergolong lambat karena manajemen pengelolaannya dilakukan secara tradisional, tidak dengan perencanaan yang sistematis dan kurang mendapat pembinaan secara intensif dari pemerintah. Basis kegiatannya tersebar pada tujuh (7) desa, yaitu : (1). Desa Bobawae, (2). Desa Malapat, (3). Desa Mateketen, (4). Desa Ombawa, (5). Desa Sebelei. (6). Desa Talapaon, dan (7). Desa Tagono. Desa Mateketen merupakan desa yang paling potensial dalam produksi kudapan kenari, karena selain memiliki jumlah pengusaha yang terbanyak dibanding desa-desa lainnya. Di samping itu juga, memiliki jumlah produksi yang terbesar. Dengan dasar pertimbangan itu, desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian.

Seperti halnya jenis kegiatan UMKM lainnya, pengembangan usaha kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan bertujuan meningkatkan pendapatan pengusaha. Akan tetapi di dalam upaya pengembangannya, UMKM ini dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa di antaranya yang paling penting adalah : (1) investasi usaha yang kecil, karena tidak adanya bantuan pemerintah daerah dan akses dari lembaga keuangan perbankan setempat dalam bentuk kredit investasi, (2) teknologi produksi yang masih bersifat tradisional, dan (3) akses pasar yang terbatas. Implikasi dari kondisi ini adalah rendahnya jumlah produksi dan pendapatan yang dapat dihasilkan pengusaha. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menawarkan rekomendasi sebagai solusi atas pemecahan masalah dimaksud.

Secara teoritis pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain harga pasar dari produk itu sendiri, di samping itu faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha adalah jumlah (volume)

produksi yang terjual, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, penelitian ini tidak akan mengkaji keseluruhan faktor tersebut secara kolektif, melainkan dibatasi hanya pada variabel harga jual, volume penjualan, dan biaya produksi. Kondisi ini dipandang cukup memberikan deskripsi tentang perilaku pengusaha (produsen) dalam memproduksi untuk menghasilkan pendapatan di desa yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, produksi kudapan kenari harus diperbesar. Akan tetapi, produksi kudapan kenari yang dihasilkan para pengusaha UMKM di desa ini relatif terbatas. Produksi tidak dilakukan oleh para pengusaha secara regular setiap waktu (hari/minggu/bulan) melainkan didasarkan atas pesanan pembeli (konsumen), sehingga jika pesanan meningkat, produksi dan pendapatan pengusaha meningkat. Sebaliknya, bila pesanan menurun, produksi dan pendapatan juga ikut berkurang.

Pada aspek produksi, volume produksi kudapan kenari yang dihasilkan pengusaha UMKM dipengaruhi oleh bahan baku daging buah kenari, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan investasi yang ditanamkan para pengusaha. Sementara pada aspek pendapatan, besar-kecilnya pendapatan yang dihasilkan pengusaha dipengaruhi oleh harga jual, volume produksi yang terjual dan biaya produksi. Karena itu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa substansi masalah pokok sebagai berikut :

- (1). Apakah bahan baku daging buah kenari, jumlah tenaga kerja dan investasi berpengaruh terhadap produksi kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan ?
- (2). Apakah produksi kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, berada pada kondisi hasil balik ke skala yang meningkat (*increasing return to scale*) ?
- (3). Apakah harga jual, volume penjualan dan biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan ?
- (4). Apakah tingkat kepekaan perubahan (elastisitas) pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan elastis terhadap perubahan harga jual, volume penjualan dan biaya produksi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- (1). Menganalisis pengaruh bahan baku daging buah kenari, jumlah tenaga kerja dan investasi terhadap produksi kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan ?
- (2). Mengetahui kondisi hasil balik ke skala (*return to scale*) produksi kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3). Menganalisis pengaruh harga jual, volume penjualan dan biaya produksi terhadap pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan

- (4). Mengetahui tingkat kepekaan perubahan (elastisitas) pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan terhadap perubahan harga jual, volume penjualan dan biaya produksi kudapan kenari ?

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi :

- (1). Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran Pemerintah Desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan pendapatan pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen pada khususnya dan Kecamatan Makian Barat pada umumnya. .
- (2). Para pengusaha UMKM kudapan kenari di Desa Mateketen pada khususnya dan Kecamatan Makian Barat pada umumnya dalam upaya mengembangkan kinerja UMKM kudapan kenari dalam rangka mempercepat peningkatan skala usaha, produksi dan pendapatan yang dihasilkan.